



RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN REMBANG

2026

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295)6980754
Fax. (0295) 6980754 Web: <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
Email :dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59212

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan karunia-NYA, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 berpedoman pada Perda Nomor 07 Tahun 2025 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, Perbup Nomor 24 Tahun 2025 Tentang RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 dan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang berguna untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta perkiraan maju. Selain itu, Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan perkiraan realisasi Renstra pada tahun berjalan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dalam menjalankan mandat atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam renja tahun 2026 ini, Amin.

Rembang, 30 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. H. GANTIARTO St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1. Latar Belakang I-1

 1.2. Landasan Hukum I-3

 1.3. Maksud dan Tujuan I-4

 1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 II-1

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang II-1

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang II-16

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang II-25

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 II-30

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG III-1

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati III-1

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang..... III-8

 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan III-12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG IV-1

BAB V PENUTUP V-1

 5.1. Catatan Penting V-1

 5.2. Kaidah Pelaksanaan V-2

 5.3. Rencana Tindak Lanjut V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 II-2

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 II-11

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang II-22

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 II-31

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2026 II-42

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029..... III-10

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja). Sebagai dokumen resmi perangkat daerah, rencana kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) pada setiap organisasi perangkat daerah.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahun ke satu dari dokumen Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Dinkominfo Kabupaten Rembang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berperan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang tahun 2026 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Renja Dinkominfo ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2026. Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini, telah melalui rangkaian proses panjang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menelaah seluruh dokumen terkait, memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan provinsi, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tupoksinya. Renja ini disusun melalui pelaksanaan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para *stakeholders* terkait yang nantiya akan ditetapkan menjadi dokumen renja. Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang untuk tahun 2026, dimana pencapaian sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan pemerintah pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja perangkat daerah merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
- b. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
20. Surat Edaran Nomor : 000.7/5031/2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian Kabupaten Rembang Tahun 2026;
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian tahun 2026 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
 - 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
- BAB V Penutup
 - 5.1. Catatan Penting
 - 5.2. Kaidah Pelaksanaan
 - 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu proses peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dengan melakukan penilaian terhadap hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Evaluasi dilakukan guna mengetahui, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan mendasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Dinkominfo Kabupaten Rembang sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik. Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Renstra, Dinkominfo Kabupaten Rembang melaksanakan 5 program, 10 kegiatan, 35 sub. Kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp6.526.061.980,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp6.200.043.900,00 (95%). Adapun gambaran hasil pelaksanaan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase ketercapaian pelayanan umum	83 73 100 %	81,75 75,26 100 %	83 73 100 %	89,73 61,42 100 %	108% 84% 100%	83 73 100 %	83 73 100 %	100%
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	
2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	
2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan	100%	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	
2 16 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
2 16 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dengan kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	35 Unit	35 Unit	
2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	
2 16 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	
2 16 02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2 16 02 2.01 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 rekomendasi	4 rekomendasi	
2 16 02 2.01 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 Media	1 Media	
2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1565 konten	1565 konten	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		1 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	5 Permohonan	5 Permohonan	
2 16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		1 Layanan	1 Layanan	1 layanan	100%	5 laporan	5 laporan	
2 16 02 2.01 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 komunitas	1 komunitas	
2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	3,06	4,50	3,06	4,40	144%	3,09	3,09	
		Indeks Perencanaan Strategis	2,66	3,25	2,66	3,00	113%	2,69	2,69	
		Indek teknologi, informasi dan komunikasi	2,66	3,25	2,66	5,00	188%	2,69	2,69	
		Indek penyelenggaraan	2,66	2,50	2,66	2,50	94%	2,69	2,69	
		Indek penerapan manajemen	2,24	2,13	2,24	2,50	112%	2,27	2,27	
		Indek pelaksanaan audit TIK	2,24	3,00	2,24	3,00	134%	2,27	2,27	
		Indek layanan administrasi pemerintahann berbasis elektronik	3,69	3,80	3,69	4,20	114%	3,72	3,72	
		Indeks layanan publik berbasis elektronik	3,69	4,67	3,69	5,00	136%	3,73	3,73	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	100% (335 domain)	100% (335 domain)	100% (335 domain)	100% (335 domain)	100%	100% (335 domain)	100% (335 domain)	100%
2 16 03 2.01 0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%
2 16 03 2.02 0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 16 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	40 OPD	40 OPD	
2 16 03 2.02 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	40 OPD	40 OPD	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam satu data	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	100%	40 OPD	40 OPD	100%
2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		2 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	100%	100%	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2 20 02 2.01 0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		0	40 OPD	40 OPD	100%	100%	100%	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.526.061.980	6.200.043.900	95%
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.362.561.980	6.049.926.838	95%
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase ketercapaian pelayanan umum	83 73 100 %	89,73 61,42 100 %	108% 84% 75%	5.238.561.980	4.953.204.090	95%
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100%	41.030.000	40.451.000	99%
2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3.500.000	3.375.000	96%
2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.430.000	1.430.000	100%
2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100%	3.300.000	3.156.000	96%
2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	32.800.000	32.490.000	99%
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	100%	100%	3.490.099.980	3.323.557.909	95%
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan	100%	3.338.499.980	3.171.957.909	95%
2 16 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 dokumen	100%	150.600.000	150.600.000	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	100%	1.000.000	1.000.000	100%
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100 %	100 %	100 %	157.250.000	132.392.702	84%
2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	10.570.000	9.871.600	93%
2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	45.680.000	40.884.000	90%
2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	10.000.000	8.778.900	88%
2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	20.000.000	18.047.000	90%
2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	8.000.000	7.866.000	98%
2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6.000.000	2.920.000	49%
2 16 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	15.000.000	11.588.100	77%
2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	42.000.000	32.437.102	77%
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	1.474.997.000	1.393.250.287	94%
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	1.675.000	1.450.000	87%
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	925.200.000	906.208.287	98%
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	548.122.000	485.592.000	89%
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dengan kondisi baik	100 %	100 %	100 %	75.185.000	63.552.192	85%
2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	100%	36.000.000	31.267.192	87%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	100%	15.000.000	12.100.000	81%
2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	10.185.000	7.685.000	75%
2 16 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	100%	14.000.000	12.500.000	89%
2 16 02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100 %	100 %	100 %	754.000.000	735.657.709	98%
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100 %	100 %	100 %	754.000.000	735.657.709	98%
2 16 02 2.01 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dokumen	2 dokumen	100%	24.000.000	23.360.000	97%
2 16 02 2.01 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	100%	127.000.000	125.806.100	99%
2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	100%	108.000.000	94.667.834	88%
2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	100%	40.000.000	39.517.700	99%
2 16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1 layanan	100%	430.000.000	428.232.075	100%
2 16 02 2.01 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 dokumen	100%	25.000.000	24.074.000	96%
2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	100%	100%	370.000.000	361.065.039	98%
		Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	3,06	4,40	144%			
		Indeks Perencanaan Strategis	2,66	3,00	113%			
		Indek teknologi, informasi dan komunikasi	2,66	5,00	188%			
		Indek penyelenggaraan	2,66	2,50	94%			
		Indek penerapan manajemen	2,24	2,50	112%			
		Indek pelaksanaan audit TIK	2,24	3,00	134%			
		Indek layanan administrasi pemerintahann berbasis elektronik	3,69	4,20	114%			
		Indeks layanan publik berbasis elektronik	3,69	5,00	136%			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	100% (335 domain)	100% (335 domain)	100%	30.000.000	29.502.780	98%
2 16 03 2.01 0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	30.000.000	29.502.780	98%
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%	340.000.000	331.562.259	98%
2 16 03 2.02 0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	111.440.000	110.047.630	99%
2 16 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	208.560.000	202.669.129	97%
2 16 03 2.02 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	18.845.500	94%
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					130.000.000	122.039.062	94%
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	130.000.000	122.039.062	94%
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam satu data	40 OPD	40 OPD	100%	130.000.000	122.039.062	94%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	30.000.000	23.647.499	79%
2 20 02 2.01 0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40 OPD	40 OPD	100%	100.000.000	98.391.563	98%
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					33.500.000	28.078.000	84%
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi	100%	100%	100%	33.500.000	28.078.000	84%
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%	100%	100%	33.500.000	28.078.000	84%
2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100%	33.500.000	28.078.000	84%

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2024, secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Faktor-faktor yang mendukung dalam mencapai target kinerja tersebut adalah:

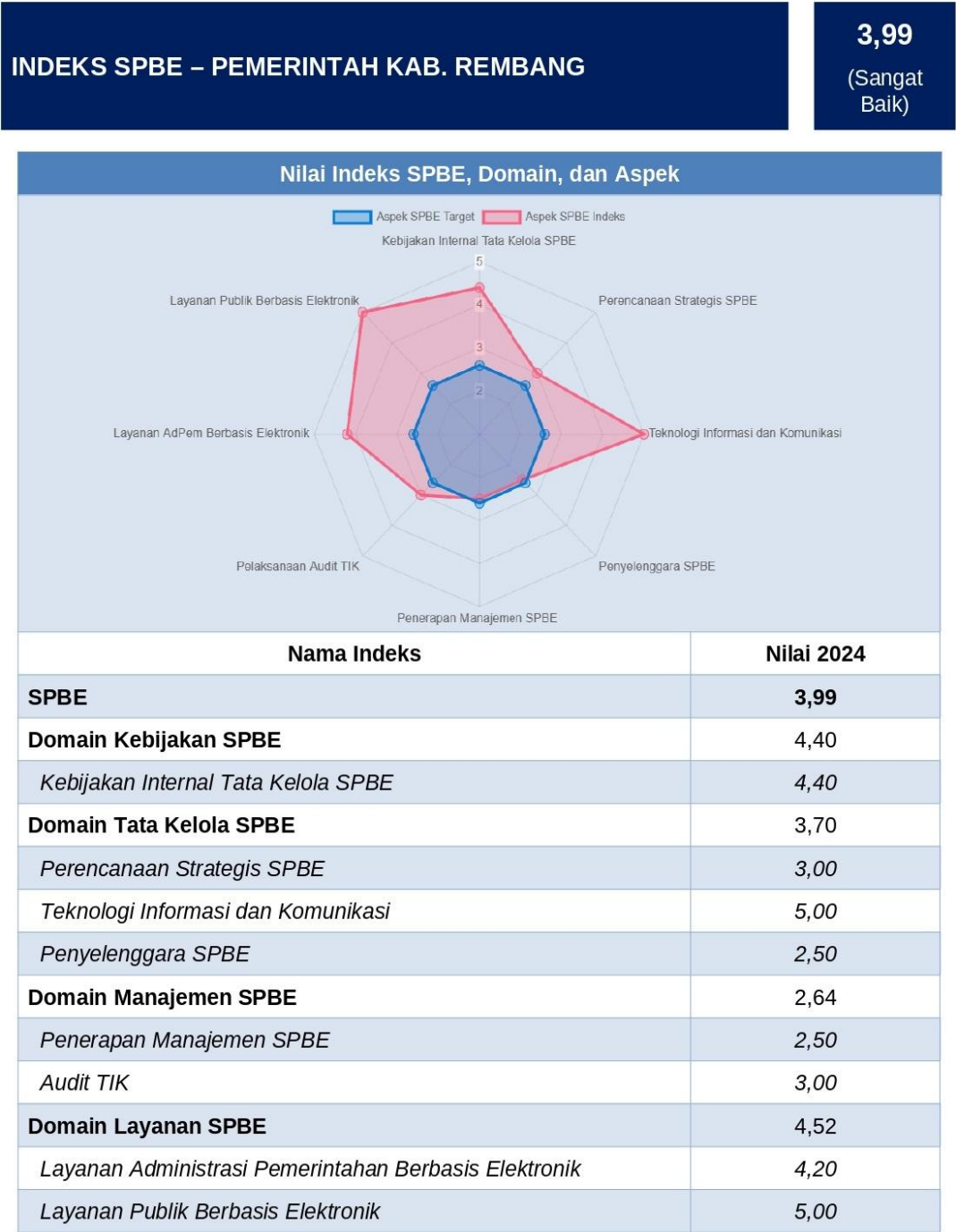
- a. Kesadaran penyediaan informasi publik dari seluruh OPD mendukung pencapaian keterbukaan informasi publik;
- b. Meningkatnya penyediaan layanan publik berbasis sistem elektronik yang terintegrasi mendukung pencapaian SPBE;
- c. Realisasi kinerja dipengaruhi oleh semakin meningkatnya komitmen Dinkominfo dalam menjaga konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator kinerja pada tahapan perencanaan dan penganggaran;
- d. Koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen renja dan dalam hal pengawalan target realisasi anggaran program/ kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Di dalam Renstra Dinkominfo, disebutkan bahwa Dinkominfo Kabupaten Rembang memiliki 4(empat) sasaran strategis yang diuraikan kedalam 7 (tujuh) indikator sasaran, dimana Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Capaian kinerja Dinas Komunikas dan Informatika dengan 4(empat) indikator sasaran, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), nilainya untuk tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat “sangat baik” meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,64 dengan predikat sangat baik”, dan telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Rembang untuk tahun 2024 sebesar 3,30. Nilai indeks SPBE tersebut mengalami kenaikan 0,35 dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 3,64 dengan predikat ”sangat baik”.

Adapun penjelasan nilai SPBE Kabupaten Rembang secara rinci adalah sebagai berikut:



- 1) Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE.

2) Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

4) Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

5) Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

6) Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

7) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi, Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara / daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, dan kinerja pegawai.

8) Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1-3.

Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang, sudah dapat menggambarkan predikat “sangat baik” dalam penerapan SPBE. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah pada penerapan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan penerapan aplikasi administrasi pemerintahan yang sebagian besar telah terintegrasi satu dengan lainnya, serta aplikasi layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait. Integrasi ini menjadikan proses bisnis yang ada menjadi lebih efektif. Aspek yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan adalah pada aspek TIK yaitu ketersediaan jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Reviu kebijakan dan reviu pengelolaan aplikasi harus selalu dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam hal keamanan informasi, melalui Forum Persandian dan Keamanan Informasi berupaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain itu juga dilakukan audit keamanan informasi bagi perangkat daerah untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan informasi. Tidak semua perangkat daerah memiliki SPBE khusus yang diimplementasikan pada perangkat daerah tersebut, maka untuk mengukur tingkat keamanan informasi dimulai dari pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi.

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan Nilai indeks yang berguna untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Nilai ini berguna untuk mengetahui kondisi keamanan informasi saat ini dimana Indeks KAMI merupakan tools, untuk menentukan kondisi tingkat keamanan informasi serta untuk memperbaiki, membangun, dan menjalankan keamanan informasi.

Pada laporan tingkat keamanan informasi tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2 Tahun 2021 yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merujuk pada ISO 27001:2013 dengan skor 292. Penilaian menggunakan Indeks KAMI dilakukan pada 7 (tujuh) area yaitu :

- 1) Kategori Sistem Elektronik (SE)
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 5) Pengelolaan Aset Keamanan Informasi
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi
- 7) Suplemen

Dalam hal regulasi, untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan keamanan SPBE, maka pada tahun 2024 ditetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Pada indikator Keterbukaan Informasi Publik (KIP) , nilai skor untuk tahun 2024 sebesar 92,05 dengan kategori “Informatif” mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 95,46 dengan kategori “Informatif”.

Hal ini dikarenakan capaian nilai pada publikasi website dan medsos PPID kurang maksimal. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan mempertimbangkan hal-hal, antara lain: monitoring dan evaluasi badan publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik.

Terkait ketersediaan data sektoral, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang resmi menerbitkan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang. Buku ini memuat hasil kompilasi data statistik sektoral dari berbagai perangkat daerah yang bertindak sebagai produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran data secara umum terkait penyelenggaraan bidang pemerintahan, produk hukum, keuangan daerah, kepegawaian daerah dan sebagainya. Penerbitan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas hasil kegiatan pelaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dan berguna sebagai bahan evaluasi, monitoring dan perencanaan kegiatan pembangunan. Kedepan terkait dengan data-data akan dikaji lebih detail, sehingga bisa memberikan kontribusi terkait pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang lebih gemilang.

Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun, seperti variabel skoring kinerja masing-masing indikator mengalami penajaman dan perluasan cakupan, maka Dinkominfo Kabupaten Rembang perlu melakukan penyesuaian strategi kebijakan dan tidak boleh puas dengan hasil kinerja saat ini. Dinkominfo Kabupaten Rembang ke depan memiliki tantangan yang berat karena berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi dimana dinamikanya sangat cepat.

Adapun Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2024 disajikan oleh tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan PD/ Indikator Sasaran PD/ Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Renstra PD			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Tujuan Perangkat Daerah													
	Renstra Tahun 2021-2026													
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Indikator : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	2,85	3,20	3,23	3,32	2,76	3,19	3,64	3,99	97%	100%	113%	120%
II	Sasaran Perangkat Daerah													
	Renstra Tahun 2021-2026													
a.	Sasaran I : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien Indikator : Domain Kebijakan SPBE	Indeks	NA	3,00	3,03	3,06	2,8	3,40	4,50	4,40	NA	113%	149%	144%
b.	Sasaran I : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien Indikator : Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	NA	2,60	2,63	2,66	2,2	2,70	3,10	3,70	NA	104%	118%	139%
c.	Sasaran I : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien Indikator : Domain Manajemen SPBE	Indeks	NA	2,18	2,21	2,24	1,00	2,55	2,36	2,64	NA	117%	107%	118%

No	Indikator Tujuan PD/ Indikator Sasaran PD/ Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Renstra PD			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d.	Sasaran I : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien Indikator : Domain Layanan SPBE	Indeks	NA	3,63	3,66	3,69	3,69	3,63	4,14	4,52	NA	100%	113%	122%
e.	Sasaran II : Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah Indikator : Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	285	290	300	310	289	294	290	292	101%	101%	97%	94%
f.	Sasaran III : Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik Indikator : Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Nilai	70	90	90	90	59,85	85,98	95,46	92,05	86%	96%	106%	102%
g.	Sasaran IV : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Indikator :Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	NA	55	60	65	NA	55	100	100	NA	100%	167%	154%
III	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah													
1	Komunikasi dan Informatika													
a	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						100%	100%	100%	100%				
b	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						58%	77%	81%	87%				

No	Indikator Tujuan PD/ Indikator Sasaran PD/ Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Renstra PD			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						69%	49%	79%	97%				
2	Statistik													
a	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						100%	100%	100%	100%				
b	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						100%	100%	100%	100%				
3	Persandian													
a	Tingkat keamanan informasi pemerintah						42%	56%	45%	45%				
4	Transparansi dan Partisipasi Publik													
a	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)						90%	95%	100%	100%				
b	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)						100%	98%	100%	100%				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu-isu penting Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) /Sistem Pemerintahan digital Sebagai Pendukung Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan;

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Indeks SPBE merupakan nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, penerapan manajemen dan layanan. SPBE berguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan SPBE pada tingkat daerah, dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Implementasi transformasi digital terdapat pada 4 bidang fasilitasi, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pengembangan layanan publik dengan SPBE sebagai salah satu fokus kegiatan dalam menyukseskan 5 Prioritas RKPD Tahun 2026, dapat memberikan peluang untuk mendorong dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun layanan SPBE, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang telah diimplementasikan secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Layanan Pengadaan Barang Jasa : LPSE
 - b. Layanan Perizinan : IJIN GAMPIL
 - c. Layanan Kependudukan : Sipenduk Online
 - d. Layanan Antrian Puskesmas : SIMPUS
 - e. Layanan Antrian RSUD : KRESNO
 - f. Layanan KIR Online : EKIR
 - g. Layanan Penggunaan Jalan SIRAJA
 - h. Layanan Rekomendasi BBM bagi nelayan : SIPARI
 - i. Layanan Aduan Masyarakat : SPAN LAPOR
 - j. Layanan Aduan Masyarakat : LAPOR GUB
 - k. Layanan bagi pencari kerja atau ketenagakerjaan : NAKER BISA
 - l. Layanan UMKM SIPUMA
 - m. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah : SIMPATDA
 - n. Sistem Informasi Proses Pengajuan BPHTB secara online : E-BPHTB
 - o. Sistem Informasi Perubahan Mutasi SPPT PBB-P2 secara online
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah secara Terpadu dan Terintegrasi

Pusat data merupakan fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk layanan.

Pusat data juga memiliki infrastruktur, konektivitas, pengelolaan, manajemen dan alokasi sumber daya untuk keperluan ketersediaan layanan jangka panjang, kehandalan dan keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi. Pusat data yang menjadi sentral layanan teknologi informasi dan komunikasi menjadi aset vital bagi terselenggaranya layanan, baik berjalannya sebuah layanan sistem informasi, dan akses dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pusat data menjadi strategis karena menunjukkan eksistensi aset yang sangat berharga yaitu data dan informasi. Dalam perspektif nasional, sebuah negara, instansi pemerintah, organisasi bisnis pasti berusaha untuk menjaga kepentingan, dan aset pentingnya tersebut sehingga keberadaan pusat data menjadi penting.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena data yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan seringkali kurang akurat, relevan dan *uptodate*, sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan data yang terpadu, akurat dan *uptodate* serta kolaborasi antar aplikasi organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang. Penyelenggaraan Satu Data Rembang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Hal ini diawali dengan pengelolaan Big Data, dimana data yang dibutuhkan sangat besar, bervariasi dan selalu *realtime*. Pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan penggunaan Big Data untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga ke depan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik.

3. Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dilakukan secara transparan, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni badan publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas.

Dinkominfo Kabupaten Rembang selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Kabupaten Rembang agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki badan publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, badan publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan Dinkominfo Kabupaten Rembang yang belum optimal, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan analisis isu publik sehingga informasi dan respon Pemerintah Kabupaten Rembang lebih tepat sasaran;
- b. Peningkatan jumlah dan jenis konten media publik serta optimalisasi CB FM;
- c. Platform aduan publik yang terintegrasi antar OPD, instansi vertikal dan BUMD;
- d. Survey (platform) mengukur efektivitas pesan melalui media.

4. Implementasi Satu Data Statistik Sektoral

Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan, namun sayangnya data masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Data yang tersimpan di masing-masing perangkat daerah ini sering menyebabkan terjadi duplikasi data, bahkan data tertentu dimiliki atau dikelola oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah sehingga menyulitkan untuk mengetahui data mana yg lebih tepat dan akurat. Seyogyanya semua perangkat daerah harus sepakat terkait dengan format dan metadata suatu data, karena dengan beragamnya format dan meta data di masing-masing perangkat daerah akan menyulitkan untuk mengintegrasikan menjadi satu data sehingga penting sekali keberadaan regulasi yang mengatur terkait dengan implementasi satu data.

Data sektoral merupakan data statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan. Pembinaan statistik sektoral dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat menghasilkan data yang berkualitas dan mudah diseminasikan. BPS juga melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral untuk mengukur Tingkat kematangannya. Ketersediaan data statistik sektoral yang valid mempunyai peran yang penting yaitu sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan maupun kebijakan pemerintah daerah lainnya. Untuk menghasilkan data statistik sektoral yang valid, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain : koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang, peningkatan SDM Wali Data Pendukung dan penyediaan aplikasi pengumpulan data yang terintegrasi.

5. Optimalisasi Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan penyelenggara pelayanan publik terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman keamanan informasi,

yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peran sumber daya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola teknologi informasi dan komunikasi mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*). Adanya ancaman terhadap sumber daya informasi tersebut merupakan tantangan bagi Dinkominfo Kabupaten Rembang untuk melakukan pengamanan data dan informasi.

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka optimalisasi keamanan informasi yang merupakan urusan persandian di Dinkominfo Kabupaten Rembang, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan Kualitas SDM pengelola *cyber security*.
- b. Pengajuan Layanan *Information Technology Security Assesment* (ITSA).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026

Dari hasil pencermatan internal, secara umum usulan kegiatan yang terdapat pada Rancangan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang sudah terakomodir di dalam Ranwal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026. Secara lebih detail dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.990.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.812.119.025	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.075.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.693.919.025	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100 %	6.640.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100 %	7.213.219.025	
2.16.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah	80 %	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah	80 %	15.325.000	
2.16.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000	
2.16.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	600.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.600.000	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.625.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	80 %	4.406.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	80 %	5.970.519.025	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	4.234.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	5.809.019.025	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	170.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160.800.000	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan umum	100 %	202.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan umum	100 %	162.500.000	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.500.000	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan jasa penunjang perkantoran	100 %	1.792.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan jasa penunjang perkantoran	100 %	978.375.000	
2.16.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.675.000	
2.16.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	961.200.000	
2.16.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	540.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.500.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dengan kondisi baik	100 %	215.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dengan kondisi baik	100 %	86.500.000	
2.16.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	42.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	15.000.000	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	14.000.000	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten	100 %	1.340.000.000	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten	100 %	815.700.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD (Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, Akses publik terhadap informasi keuangan daerah)	100 %	1.340.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD (Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, Akses publik terhadap informasi keuangan daerah)	100 %	815.700.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 02 2.01 0014	Relasi Media	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	450.000.000	Relasi Media	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	247.000.000	
2 16 02 2.01 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	170.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	15.500.000	
2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	120.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	37.200.000	
2 16 02 2.01 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	225.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	200.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	135.000.000	
2 16 02 2.01 0023	Penyusunan Konten	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Konten Informasi Publik	1800 Konten	175.000.000	Penyusunan Konten	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Konten Informasi Publik	1800 Konten	181.000.000	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase Aplikasi layanan yang terintegrasi	100	1.095.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase Aplikasi layanan yang terintegrasi	100	665.000.000	
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	72,30				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	72,30		
2.16.03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan OPD dan Desa yang menggunakan domain rembangkab.go.id	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	120.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan OPD dan Desa yang menggunakan domain rembangkab.go.id	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	65.000.000	
2 16 03 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	120.000.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	65.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Terfasilitasi layanan pusat data)	100 %	975.000.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Terfasilitasi layanan pusat data)	100 %	600.000.000	
2 16 03 2.02 0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	275.000.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	100.000.000	
2 16 03 2.02 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	450.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	400.000.000	
2 16 03 2.02 0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				640.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				64.500.000	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	100%	640.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	100%	64.500.000	
2.20.02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Tersajinya buku statistik sektoral	1 Buku	640.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Tersajinya buku statistik sektoral	1 Buku	64.500.000	
2.20.02.2 .01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	100.000.000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	12.500.000	
2.20.02.2 .01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	100.000.000	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	15.000.000	
2.20.02.2 .01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	100.000.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	37.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02.2 .01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 Staf Statistik OPD 5 Staf Statistik Internal Dinkominfo	240.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 Staf Statistik OPD 5 Staf Statistik Internal Dinkominfo		
2.20.02.2 .01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	100.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			0 %	275.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			0 %	53.700.000	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	42,90	275.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	42,90	53.700.000	
2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip- prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	2 SE	275.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip- prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	2 SE	53.700.000	
7.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	75.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	25.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	75.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan		
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	40 Perangkat Daerah	25.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	40 Perangkat Daerah	9.500.000	
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	100.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	18.700.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau *planning* adalah bagian dari daur kegiatan manajemen terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem perencanaan pembangunan yang bersifat *Bottom-Up Planning*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan, bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 disajikan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah, terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, antara lain :

1. Pemanfaatan sumber daya infrastruktur dan manusia yang ada, agar percepatan digitalisasi pemerintahan dapat terwujud sehingga selaras dengan program prioritas nasional;
2. Penguatan Indeks SPBE/Pemerintahan Digital harus ditingkatkan dalam rangka percepatan digitalisasi pemerintahan di daerah;
3. Penyediaan 16 jenis layanan keamanan informasi yang ditujukan kepada kepala daerah dan wakilnya, OPD, pegawai dan aparatur sipil, serta pihak lainnya, sehingga pemerintah daerah perlu membentuk dan menyusun pedoman manajemen layanan keamanan informasi yang mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

Arahan strategi kebijakan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan digital diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan digital telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan digital untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- b. Tersedianya akses *broadband* nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan digital yang efisien, berdaya saing, dan aman;
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika, kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah yang tiap tahunnya dievaluasi oleh oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efekti, transparan dan akuntabel.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian. Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK pada dinkominfo, meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar *stakeholders* dalam mewujudkan sebuah tata kelola yang efektif.

2. BSSN (Badan Syber dan Sandi Negara)

Penanganan ancaman siber untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan strategi:

a. Strategi *Preventif*:

- 1) Penyelarasan Kebijakan dan Kegiatan dengan Strategi Keamanan Siber Nasional;
- 2) Melakukan pengujian keamanan secara berkala bagi sistem elektronik yang digunakan pada layanan publik;
- 3) Melakukan penilaian tata kelola keamanan siber;
- 4) Literasi keamanan siber pada pemangku kepentingan.

b. Strategi *Proaktif* dan *Reaktif*:

- 1) Penyusunan rencana kontigensi;
- 2) Pembentukan dan optimalisasi tugas Tim Tanggap Insiden Siber;
- 3) Melakukan pelaporan secara proaktif apabila terjadi insiden potensi ancaman keamanan siber.

c. Strategi *Deterrent*:

- 1) Kolaborasi dengan penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kejahatan siber;

- 2) Membentuk forum koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

3. BPS (Badan Pusat Statistik)

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, dengan strategi:

- a. Adanya uraian tujuan, target, indikator yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat;
- b. Mendukung kebijakan perencanaan pembangunan, SPBE, KSP, PDN, hasil keputusan Dewan Pengarah SDI dan isu strategis yang dilaksanakan oleh SDI;
- c. Mendukung daftar data prioritas yang dirumuskan Forum SDI tingkat pusat dari proses pengumpulan hingga penyebarluasan data prioritas;
- d. Program dan kegiatan yang akan dilakukan menerapkan prinsip-prinsip SDI yang meliputi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas data;
- e. Program dan kegiatan yang dilakukan mendukung pemanfaatan data mengacu pada data prioritas daerah dan pusat;
- f. Memastikan kolaborasi antar penyelenggara SDI dalam implementasi tata Kelola data dan pengelolaan standar kualitas data yang terdapat dalam Portal.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan selama Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

Dalam mewujudkan 3 (sasaran) tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan kebijakan program strategis sebagai berikut :

1. Pembangunan Pusat Data Tahap II

Penyempurnaan pembangunan pusat data di tahap II ini bertujuan untuk mencapai sertifikasi rated III secara fasilitas (Standarisasi ANSI/TIA 942), dimana sertifikat SNI/Internasional tersebut merupakan syarat dasar untuk dapat diintegrasikan dengan ekosistem Pusat Data Nasional (PDN);

2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik baik melalui media berbasis elektronik (TV, Radio, Media Online dan Media Sosial) maupun media komunikasi interpersonal Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunjukan Rakyat (PETUNRA), dalam rangka mengcounter hoax dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tepat sasaran, sehingga tercapai layanan pemerintahan yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat;

3. Mewujudkan Big Data Jawa Tengah, dengan strategi menyusun Arsitektur Big Data Jawa Tengah sebagai kerangka acuan, dan pengembangan sumber daya manusia pengelola data;

4. Penguatan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan strategi penguatan layanan seperti *Secure Socket Layer* (SSL), Firewall dan Anti Virus untuk memperkuat keamanan sistem atau aplikasi dari sisi lalu lintas data dan keamanan *workstation* pengguna, serta pemberian literasi keamanan informasi kepada OPD Provinsi Jateng, Kabupaten/Kota hingga pada tingkat SMA/SMK se-Jateng, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terhadap ancaman keamanan informasi;

5. Mendorong ketercapaian Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori tertinggi yaitu “ Informatif ”, untuk semua Badan Publik/OPD di seluruh Provinsi Jawa Tengah, sehingga terwujud suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel;

6. Melaksanakan upaya peningkatan layanan pengelolaan aplikasi informatika dan integrasi antar aplikasi melalui:

- a. Penetapan terhadap kebijakan penyelenggaraan SPBE dan Tim Koordinasi SPBE;

- b. Penerapan kebijakan SPBE kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. Penerapan kebijakan SPBE melalui penyampaian petunjuk teknis/NSPK (SOP, SE, Surat) kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - d. Monev dan pengembangan layanan elektronik yang sudah ada (minimal 1 tahun sekali);
7. Mewujudkan *Smart Province* khususnya pada dimensi *Smart Governance*, melalui upaya penyusunan *Rencana Induk Smart Province* periode 2024-2026.

c. Telaahan Terhadap Kebijakan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Visi “*Mewujudkan Rembang Sejahtera*” mencerminkan tujuan besar pembangunan jangka menengah daerah, yakni menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan. Kata "sejahtera" dalam visi ini mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya kualitas hidup, dan tersedianya kesempatan yang adil bagi semua warga untuk berkembang. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah, yang apabila ditelaah, memuat dimensi strategis pembangunan yang komprehensif dan saling terkait. Dinkominfo Kabupaten Rembang sesuai dengan tupoksinya, mendukung terhadap pencapaian misi ke tiga yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional*”. Misi ini menggambarkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan digitalisasi pelayanan. Profesionalisme di sini bermakna pada pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Tahun 2026 merupakan tahun kesatu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029. Dalam menyusun dokumen RKPD tahun 2026, berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029, serta mengacu pada RKP tahun 2026 demi terwujudnya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Pada dokumen RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 disebutkan bahwa tema Tahun 2026 adalah *“Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dalam Memperkuat Peran Rembang Sebagai Bagian dari Lumbung Pangan Nasional, Didukung SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Berkualitas”*. Dari tema tersebut, kemudian ditetapkan prioritas RKPD Kabupaten Rembang tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan SDM
2. Peningkatan Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Peningkatan Infrastruktur Mantap
5. Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Salah satu prioritas RKPD tahun 2026 adalah *“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”* dimana untuk mewujudkan prioritas tersebut, strategi yang dilakukan oleh dinkominfo adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung digitalisasi birokrasi dan penerapan *smart city*. Digitalisasi Birokrasi merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan berbasis *information Technology (IT)*. Sedangkan *“Rembang Smart city”* merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan masyarakat berbasis *information Technology (IT)*. Dalam hal ini pemerintah berupaya memberikan akses internet gratis pada publik guna menunjang aktivitas warga desa yang membutuhkan koneksi internet. Untuk mendukung digitalisasi birokrasi tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan beberapa kebijakan/regulasi antara lain :

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019;

2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang yang akan menjadi pedoman dan arah bagi pembangunan SPBE.

Untuk Mewujudkan *Smart City* Lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan *Smart City* di dalam *Masterplan Smart City* dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Ada 6 (enam) dimensi dalam *Rembang Smart City Development* antara lain : *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart People dan Smart environment.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Tujuan Dinkominfo Kabupaten Rembang merujuk pada langkah strategis yang perlu dilakukan guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan adanya tujuan yang jelas, Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Perumusan tujuan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran agenda dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan dan merupakan landasan bagi Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam menentukan langkah strategis untuk mengelola pemerintahan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati Rembang yaitu "*Mewujudkan Rembang Sejahtera*", telah ditetapkan 5 (lima) misi, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang adalah 'menunjang misi ke-3 (tiga) yaitu "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional*". Dari misi tersebut, kemudian ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang professional dan berintegritas” dengan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis”. Dari sasaran tersebut, kemudian Dinkominfo Kabupaten Rembang menetapkan tujuan strategis untuk periode lima tahun mendatang, yaitu: *“Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh data statistik yang akurat dan keamanan informasi”* dengan indikator Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).

Dinkominfo Kabupaten Rembang tersebut kemudian menjabarkan tujuan strategis kedalam 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja perangkat daerah Dinkominfo Kabupaten Rembang;
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik;
- 3) Terwujudnya transformasi digital pemerintah;
- 4) Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
- 5) Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah.

Adapun penjabaran Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh data statistik yang akurat dan keamanan informasi		Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Angka	NA	-	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Rembang	Nilai SAKIP Dinkominfo	Angka	61,42	73	75	77	79	81	83	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkominfo	Angka	89,73	90	90	90	90	90	90	
			Indeks Manajemen Risiko Dinkominfo	Angka	3.969	2.625	2.705	2.785	2.868	2.953	3.040	

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Nilai KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Angka	92.05	92,3	92,8	93.3	94	94.5	95	
		Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah	Aspek Tata Kelola dan Manajemen	Angka	NA	-	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	
			Aspek Teknologi Digital	Angka	NA	-	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	
			Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Angka	NA	-	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik)	Angka	2,85	2,85	2,9	2,9	3	3	3,05	
		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Angka	292	388	393	398	403	408	413	

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- I Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
 - A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g Penyediaan Bahan/Material

- h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a Relasi Media
 - b Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - c Pelayanan Informasi Publik
 - d Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - e Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - f Penyusunan Konten
- C Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
- 2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - b Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - c Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 - A Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
 - b Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - c Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
- III Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
 - A Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 - c Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan.

Secara garis besar Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Rembang pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	:	Rp8.693.919.025,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	:	Rp64.500.000,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	:	Rp53.700.000,00
Jumlah		:	Rp8.812.119.025,00

Jumlah anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) urusan, 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 secara rinci tersaji pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.812.119.025				9.753.169.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.693.919.025				9.602.169.000
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah		100 %	7.213.219.025			100	7.972.169.000
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah		80 %	15.325.000		-	80 %	22.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	2 Dokumen	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	6.000.000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	2 Dokumen	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	3.500.000
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	3 Laporan	4.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	2 Laporan	6.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	6.500.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu		80 %	5.970.519.025		-	82%	6.265.469.000
2.16.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	63 Orang/bulan	5.809.019.025	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	63 Orang/bulan	6.099.469.000
2.16.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	12 Dokumen	160.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	165.000.000
2.16.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	1.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum		100 %	162.500.000		-	100 %	215.500.000
2.16.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	13.000.000
2.16.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	38.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	12.000.000
2.16.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	26.000.000
2.16.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	12.000.000
2.16.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.500.000
2.16.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	19.000.000
2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	12 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	72.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan jasa penunjang perkantoran		100 %	978.375.000		-	100 %	1.281.200.000
2.16.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	1.675.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	2.200.000
2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	12 Laporan	961.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	1.263.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	15.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	16.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan kondisi baik		100 %	86.500.000		-	100 %	188.000.000
2.16.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	20 Unit	42.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 Unit	85.000.000
2.16.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	35 Unit	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	35 Unit	22.000.000
2.16.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Unit	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	60.000.000
2.16.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	20 Unit	14.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 Unit	21.000.000
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten		100 %	815.700.000			100 %	914.000.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD (Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, Akses publik terhadap informasi keuangan daerah)		100 %	815.700.000		-	100 %	914.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 02 2.01 0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	5 Laporan	247.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Laporan	277.000.000
2 16 02 2.01 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	10 Komunitas	15.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	14 Komunitas	30.000.000
2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	10 Permohonan	37.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Permohonan	77.000.000
2 16 02 2.01 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	10 Rekomendasi	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Rekomendasi	200.000.000
2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Media	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Media	140.000.000
2 16 02 2.01 0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1800 Konten	181.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2000 Konten	190.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi layanan yang terintegrasi		100	665.000.000			100	716.000.000
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet		72,30				73,19	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan Desa yang menggunakan domain rembangkab.go.id		335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	65.000.000		-	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	86.000.000
2 16 03 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	86.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Terfasilitasi layanan pusat data)		100 %	600.000.000		-	100 %	630.000.000
2 16 03 2.02 0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	110.000.000
2 16 03 2.02 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	40 Perangkat Daerah	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Perangkat Daerah	410.000.000
2 16 03 2.02 0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	110.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				64.500.000				92.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi		100%	64.500.000			100%	92.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersajinya buku statistik sektoral		1 Buku	64.500.000		-	1 Buku	92.000.000
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	100 %	12.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 %	26.000.000
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	100 %	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	26.000.000
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	100 %	37.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 %	40.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			0 %	53.700.000				59.000.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah		42,90	53.700.000			43,45	59.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)		2 SE	53.700.000		-	2 SE	59.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	25.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	27.000.000
2.21.02.2.0 1.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	40 Perangkat Daerah	9.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Perangkat Daerah	10.000.000
2.21.02.2.0 1.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	18.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	22.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2026 dimana tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2026 ini lebih bersifat operasional dan berguna sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini, juga mengacu berbagai dokumen terkait di bidang urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian dengan mempertimbangkan berbagai masukan melalui pendekatan teknokratis dan demokratis serta memperhatikan perkembangan isu-isu strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas berbasis digital. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya diarahkan untuk mendukung program unggulan pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang merupakan kewenangan Dinkominfo Kabupaten Rembang, antara lain :
 - a. Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasar fakta dan data;
 - b. Digitalisasi perencanaan, penatausahaan, monev kegiatan, serta digitalisasi *procurement*, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - c. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik.

Keberhasilan program unggulan tersebut akan memberikan berkontribusi pada capaian RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 yang bertema *“Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dalam Memperkuat Peran Rembang Sebagai Bagian dari Lumbung Pangan Nasional, Didukung SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Berkualitas”*.

2. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen, maka penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 berpedoman pada dokumen perencanaan seperti : Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 dan dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD dan DPRD Kabupaten Rembang.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan Dinkominfo Kabupaten Rembang dan sebagai acuan penganggaran pada tahap penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di SIPD RI.

Melalui Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komprehensif dan terpadu ini, diharapkan kinerja pembangunan Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini. Akhir kata semoga Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini, dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* berbasis digital menuju tercapainya visi daerah yaitu **“Mewujudkan Rembang Sejahtera”**.

Rembang, 30 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC. GANTIARTO St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001